

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses yang dilalui suatu negara dalam mencapai demokrasi dianggap sebagai demokratisasi. Dalam proses masa transisi tersebut terdapat pemilihan pemimpin negara sebagai upaya perwujudan demokrasi. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi diartikan sebagai metode dan mekanisme dalam memilih pimpinan politik oleh warga negara.¹ Para pimpinan-pimpinan politik akan bersaing dan meraih suara agar terpilih. Metode yang secara idealnya mengandung makna tentang individu memperebutkan kekuasaan secara legal melalui persaingan yang masuk akal dalam meraih suara sebanyak-banyaknya. Adapun tujuan akhir dari persaingan tersebut adalah untuk mendapatkan suatu keputusan politik.

Makna demokrasi secara prosedural adalah pemilihan umum. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.² Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap sebagai tradisi yang dilakukan oleh negara yang menganut demokrasi. Dalam hal memilih pemimpin negara yang mana mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilu juga dimaknai sebagai proses pemindahan legitimasi kekuasaan yang dilakukan tanpa kekerasan. Pemilu

¹Georg Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah, terj. Tadjuddin Noer Effendi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hal 14

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sebagai upaya keberhasilan demokrasi diharapkan mampu menciptakan ruang kebebasan bagi seluruh masyarakat dalam memilih dan menentukan siapa yang akan menjabat sebagai wakil rakyat.

Terdapat tiga indikator pemilu yang berkualitas dan berintegritas; diantaranya (1) ditandai dengan kompetisi antar partai yang adil dan bebas; (2) penyelenggaraan pemilu secara profesional, independen dan imparial; (3) sistem penegakan hukum yang dilaksanakan secara adil dan tepat waktu.³ Indikator ini menjadi standar pelaksanaan pemilu sehingga mencapai pemilu yang ideal. Menilik pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan idealnya pemilu.

Malpraktik terjadi ditandai dengan adanya keterlibatan broker politik dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu pelanggaran tersebut dilakukan oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik melakukan manipulasi dukungan dengan tujuan memperoleh dukungan keanggotaan dalam pemilu. Partai politik mengambil jalur broker untuk menjangkau dukungan perolehan suara dari masyarakat akar rumput. Apabila dilihat secara hirarki partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu berada di posisi paling atas. Sedangkan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilu berada di posisi paling bawah. Dalam keadaan tersebut peranan broker dibuktikan oleh partai politik. Broker dianggap mampu memastikan perolehan dukungan keanggotaan dari masyarakat. Dengan demikian broker dijadikan sebagai upaya tambahan bagi partai politik.

³ Muh. Iqbal Latief, "Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia", Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol 10 No 1, Makassar, hal 31

Secara sederhana, broker dimaknai sebagai penghubung antara kandidat dengan pemilih terutama masyarakat di perdesaan. Menurut Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco memaknai broker sebagai pihak yang dianggap sebagai sumber solusi bagi para kandidat dalam hal mencari dukungan.⁴ Broker merupakan orang yang berperan sebagai penyalur kepentingan antara partai politik dengan masyarakat. Peranan broker itu membangun sebuah hubungan antara patron dan klien. Patron diartikan sebagai pihak yang memberikan manfaat atas suatu kepentingan, sehingga patron dianggap mampu menyediakan sumber daya yang mendukung tercapainya kepentingan tersebut. Sedangkan klien ditujukan kepada pihak yang berada di posisi bawah sebagai penerima manfaat dari patron.

Dalam hubungan parton dan klien, partai politik diposisikan sebagai patron. Hal ini dikarenakan partai politik mempunyai kepentingan terhadap dukungan keanggotaan dari masyarakat. Hubungan yang dibangun tentu didukung atas sumber daya yang disediakan oleh patron. Adapun sumber daya yang dimaksud ialah barang atau jasa. Seperti temuan dalam pemilu sebelumnya bahwa terdapat beberapa tindakan sebagai wujud patronase.⁵ Pertama, pembelian suara dan pemberian pribadi. Tindakan ini mengandung makna bahwa para kandidat memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai pemilih. Kemudian masyarakat tersebut juga akan memberikan hak pilihnya kepada kandidat yang

⁴ Anindita Pratitaswari, Sri Budi Eko Wardani, "Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu", Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 19 No. 2, 2020, hal 220

⁵ Edward Aspinal & Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014, Penerbit Polgov : Yogyakarta, 2015, hal 24

bersangkutan. Pembelian suara dilakukan beberapa hari menjelang pemilu dilaksanakan.

Tidak jarang praktik patronase ini terjadi sehari sebelum pelaksanaan pemilu. Partai politik bersama tim suksesnya melakukan pembelian suara. Melalui pemberian uang atau barang kepada masyarakat yang akan diraup hak suaranya. Adapun pemberian uang dapat berkisar dalam nominal 20.000 sampai 50.000 untuk masing-masing orang. Sedangkan untuk pemberian barang tidak jauh dari keperluan pokok dari masyarakat, seperti halnya sembako. Menariknya pembelian suara cenderung dilakukan pada waktu subuh menjelang hari pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, tindakan ini disebut sebagai serangan fajar.

Kedua, pelayanan dan aktivitas, serta barang-barang kelompok. Bentuk tindakan ini dilakukan saat kampanye, seperti kampanye pada saat penyelenggaraan acara-acara komunitas, acara turnamen bola, catur, atau acara lainnya oleh komunitas. Selain itu bentuk patronase ada dalam pemberian donasi kepada komunitas yang dikenal dengan *club goods*. Seperti penggalangan donasi terhadap komunitas di tingkat akar rumput. Ketiga, wujud patronase selanjutnya ialah proyek gentong babi. Tindakan ini ditujukan untuk memastikan dan meyakinkan kembali pemilih, terutama kepada masyarakat pada posisi bawah tentang bagaimana keberhasilan para kandidat pertahana dalam *treck record*-nya. Tidak hanya itu, mereka akan menyertakan program-program atau proyek-proyek yang dijalankan sebelumnya untuk mencapai keberhasilan.

Hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk klientalisme. Klientalisme merupakan relasi atau hubungan antara patron dengan klien yang sifatnya

personal dan hirarkis karena didalamnya mengandung unsur kekuasaan. Selain itu, klientalisme mengandung unsur materialistik. Ditandai dengan adanya pemberian keuntungan material dari partai politik kepada masyarakat. Kemudian keuntungan tersebut dipertukarkan dengan dukungan politik dari masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hicken bahwa terdapat tiga hal yang terkandung dalam klientalisme diantaranya adanya kontingensi antara jejaringan yang terbentuk, relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien, dan pertukaran dalam klientalisme akan terjadi secara terus menerus.⁶

Namun terdapat ketergantungan dari partai politik terhadap kekuatan broker politik di tingkat lokal. Namun Edward Aspinall menemukan adanya pengkhianatan dari broker dalam praktiknya. Sebagaimana yang diketahui broker politik tidak terikat hubungan dengan partai politik ataupun tim sukses. Hubungan yang dimaksud mencakup kedalam hubungan kepartaian, ideologis, atau hubungan lainnya.⁷ Secara praktiknya, broker akan cenderung bekerja dengan mengutamakan keuntungan secara materi. Sewaktu-waktu broker politik dapat berbalik arah dari tujuan yang disepakati dikarenakan adanya keadaan yang tidak memberikan untung bagi mereka.

Dilihat dari luar, keadaan di atas cenderung terjadi dalam hubungan antara partai politik dengan broker tanpa adanya struktur tim sukses. Selain berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari partai politik, tim sukses juga melakukan pengawasan terhadap keterlibatan broker. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka akan berimplikasi terhadap minimnya resiko. Sementara itu,

⁶ *Ibid*, hal 4

⁷ *Ibid*. Hal 404

partai politik hanya mengandalkan kepercayaan dan loyalitas dalam hubungan tersebut. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan anggaran yang relatif rendah dengan tidak adanya struktur tim sukses. Tapi cara tersebut mengandung resiko yang rentan terjadinya penyelewengan atau pengkhianatan oleh broker politik.⁸

Broker yang dimaknai sebagai pihak perantara mempunyai peran penting bagi partai politik sebagai peserta pemilu dalam hal pengumpulan dukungan. Apabila dilihat dalam proses pengumpulan dukungan broker cenderung mengandalkan relasi orang-orang terdekat. Seperti halnya hubungan pertetangga, hubungan antara teman, terutama hubungan keluarga atau persaudaraan. Maksudnya di sini broker yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam lingkungan masyarakat sehingga lebih mudah melakukan interaksi. Dengan begitu akan lebih mudah memastikan perolehan dukungan keanggotaan terhadap partai politik yang bersangkutan.

Perolehan suara yang dilakukan dengan cara pembelian suara sudah dijelaskan oleh Edward Aspinall. Bahwasanya broker politik dijadikan sebagai kunci dalam hal menentukan sukses atau tidaknya strategi pencarian suara dalam pemilu. Dikatakan demikian karena keadaan alamiah dari kandidat yang belum mampu secara jelas menggunakan pimpinan dari asosiasi sosial dalam menyukseskan *club goods*. Tujuan tindakan tersebut tidak lain untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai pemilih. Dengan demikian, secara tidak langsung keadaan tersebut membangun stereotip bahwa keterlibatan broker itu penting terhadap pengumpulan dukungan dalam pemilu.

⁸ Edward Aspinall, *When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia*, *Critical Asian Studies*, 2014, hal 561

Selanjutnya, terdapat penelitian yang berkaitan dengan ketelibatan broker politik dapat dilihat dari penelitian terdahulu. Pertama, penelitian dari kelompok peneliti; Fauziyah Hanom, Syarizal, dan Tengku Rika Valentina. Penelitian ini berbicara tentang pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat untuk menambah pendidikan terkait bahayanya kehadiran broker politik yang terjadi dalam pemilu tahun 2019.⁹ Kedua, penelitian dari Muhammad Khalig Radiallah. Membahas terkait keterlibatan broker dalam kemenangan salah satu kandidat yaitu Fadly Amran-Asrul pada pilkada Kota Padang Panjang tahun 2018.¹⁰

Ketiga penelitian dari Anindita Pratitaswari dan Sri Budi Eko Wardani. Penelitian ini tentang peran broker politik untuk menghubungkan broker politik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.¹¹ Keempat, penelitian dari Dicky Rizki Koara, Ubaidullah, dan Ardiansyah. Penelitian tersebut tentang peran dari salah satu kelompok, Reje Kampung masyarakat sebagai broker politik. Juga membahas terkait latar belakang Reje Kampung sehingga dianggap sebagai broker politik dalam pemilu tahun 2019.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas memberikan dominasi terhadap keterlibatan broker dalam kampanye yang dilakukan oleh kandidat untuk memenangkan pemilu. Selain itu, juga menjelaskan kajian tentang dampak yang

⁹ Fauziyah Hanom, Syarizal, dan Tengku Rika Valentina, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milenial Dalam Memahami Bahaya Vote Broker oleh KPU", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial - Vol. 6 No 1, 2019

¹⁰ Muhammad Khalig Radiallah, "Broker Dalam Pilkada : Kajian Terhadap Kemenangan Fadly Amran-Asrul Dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018",

¹¹ Anindita Pratitaswari dan Sri Budi Eko Wardani, Op.Cit, hal 217

¹² Dicky Rizki Koara, Ubaidullah dan Ardiansyah, "Peran Reje Kampung Sebagai Broker Politik Pada Pemilu 2019 Di Aceh Tengah (Studi Kasus Rere Kampung Desa Burni Kecamatan Silih Nara)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 6, Nomor 3, 2021

ditimbulkan dari kehadiran broker tersebut. Dalam pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 ini, kembali terjadi fenomena broker di Kota Bukittinggi. Sebagaimana yang diketahui bahwa KPU Kota Bukittinggi merupakan panitia penyelenggara pemilu, menerima laporan dari masyarakat bahwa identitas mereka terdaftar sebagai anggota salah satu partai politik yang bersaing dalam pemilu mendatang. Masyarakat tersebut menyatakan mereka tidak mendukung partai tersebut. Bahkan diantara mereka ada yang belum mengenal partai yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dalam formulir tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Kota Bukittinggi.

Kesenjangan yang terjadi memberikan arti bahwa pihak partai politik melakukan proses rekrutmen yang tidak terbuka. Secara sederhana, partai politik tidak mampu menjangkau setiap masyarakat untuk memperoleh identitas tersebut. Maka dari itu adanya broker politik sebagai perantara untuk pengumpulan identitas masyarakat tersebut. Kemudian didaftarkan sebagai pendukung dalam keanggotaan salah satu partai politik. Dimana mereka dibentuk atas kebutuhan dari masing-masing partai yang bersangkutan. Menimbang keterlibatan broker didalam pengumpulan dukungan partai politik memberikan ruang baru untuk penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji jaringan broker politik dalam keterlibatannya dalam proses perekrutan keanggotaan partai politik.

1.2 Perumusan Masalah

Setelah era reformasi tahun 1998, pemilu telah lima kali dilaksanakan yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada tahun 2024 juga kembali diadakan pemilu, tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Berbagai tahapan

dilakukan untuk persiapan pemilu tahun 2024. Adanya fenomena yang terjadi dalam tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu. Melalui ini mereka dapat menyampaikan keraguan mereka terkait validitas dokumen persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu. Terutama bagi masyarakat yang terdaftar dalam sistem informasi pencalonan. Namun juga bukan merupakan anggota partai politik yang bersangkutan.

Adapun fenomena tersebut terjadi pada tahapan verifikasi partai politik. Ini dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi sebagai bentuk pembuktian terhadap dukungan keanggotaan yang diperoleh dari masing-masing partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Tahapan verifikasi partai politik terbagi atas dua yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Tahapan verifikasi administrasi bertujuan untuk mendapatkan hasil memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat atas dukungan yang diperoleh partai politik. Secara konsep, tahapan verifikasi administrasi diartikan sebagai kegiatan partai politik menyerahkan semua berkas dukungan keanggotaan partai politik. Berkas dukungan tersebut akan diproses secara otomatis dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan. KPU Kota Bukittinggi melakukan input data yang mana akan dilakukan verifikasi faktual.

Partai politik memberikan berkas dukungan keanggotaan kepada KPU Kota Bukittinggi sebagai persyaratan peserta pemilu. Berkas dukungan tersebut berupa lembar kerja faktual, dimana terdiri atas identitas masyarakat yang terdaftar sebagai dukungan keanggotaan partai politik. Lembar kerja verifikasi

faktual disusun sesuai dengan identitas masyarakat dari masing-masing pendukung partai politik. Kegiatan verifikasi faktual juga dilakukan atas pembagian kelompok berdasarkan kelurahan yang tersebar di Kota Bukittinggi. KPU Kota Bukittinggi dapat melakukan konfirmasi kepada pemilik identitas terkait dukungan keanggotaan tersebut.

Tahapan tersebut berlandaskan kepada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 bahwa partai politik dianggap sebagai peserta pemilu apabila memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan, memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu orang atau satu per seribu jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik.¹³

Berdasarkan hal di atas, partai politik harus mengupayakan agar syarat yang telah menjadi ketentuan tersebut dapat terpenuhi. Tidak sedikit dari partai politik menggunakan cara cepat dalam mengumpulkan dukungan keanggotaan tersebut. Partai politik bekerja sama dengan pihak yang dianggap mampu mengumpulkan dukungan tersebut secara instan. Strategi pengumpulan dukungan cenderung menggunakan strategi materialistik.¹⁴ Dikarenakan secara sederhana masyarakat di kalangan bawah akan menormalisasikan sesuatu yang memberikan keuntungan kepada dirinya. Keuntungan yang dimaksud ialah berupa barang atau

¹³ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Edward Aspinal & Mada Sukmajati, *Op.Cit.* Hal 308

uang yang diterimanya. Disini broker mengambil peran dalam memenuhi syarat yang seharusnya dilakukan oleh partai politik.

Pada umumnya broker banyak terlibat pemenangan suara dari masing-masing kandidat yang bersaing dalam pemilu. Broker memiliki tugas dan tanggungjawab dalam meraup suara pemilih sebanyak mungkin sehingga kandidat tersebut dapat memenangkan pemilu. Meskipun demikian, sebagian dari partai politik juga memberikan peluang kepada broker sehingga ikut terlibat dalam mengumpulkan dukungan keanggotaan agar dapat maju sebagai peserta pemilu. Partai politik memilih broker politik berdasarkan penguasaan wilayah dari seseorang agar mampu memberikan pengaruh terhadap dukungan keanggotaan yang diperoleh nantinya. Biasanya mereka berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di berbagai tempat bahwa broker tersebut akan memiliki keleluasaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang menjadi tujuannya.

Pada akhirnya dukungan keanggotaan yang telah diperoleh dari masing-masing partai politik akan dilakukan verifikasi oleh KPU. Verifikasi merupakan tahapan oleh KPU dalam perihal memperjelas dan menguji keakuratan data yang diterima KPU dari partai politik. Tahapan tersebut dilakukan melalui bantuan sistem informasi partai politik untuk memperlakukan KPU dan partai politik serta pihak-pihak lainnya.¹⁵ Sehingga dengan itu dapat mengoperasikan atau menjalankan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Tahapan verifikasi yang dilakukan bertujuan untuk menakar kesiapan dari

¹⁵ Ovelio Layuk, Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019, Jurnal KPU, 2019, hal 13

partai politik dalam memenuhi syarat untuk dapat menjadi bagian peserta pemilu.¹⁶ KPU Kota Bukittinggi melakukan verifikasi terhadap dukungan yang dikumpulkan oleh partai politik.

Dalam perihal pengumpulan dukungan keanggotaan partai politik belum sepenuhnya mampu mengumpulkan dukungan secara terbuka. Dimana pengumpulan dukungan tersebut oleh partai politik dominan memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai broker politik yang berasal dari aktor lokal. Proses yang dipilih oleh partai politik tersebut memperjelas kelemahan partai politik sendiri dalam melakukan rekrutmen keanggotaan. Dengan kata lain partai politik memilih untuk tidak memperkuat basis data keanggotaan sehingga tidak jarang jika partai politik tidak mengenal anggotanya secara menyeluruh. Apabila dilihat dalam tahapan verifikasi ada pendukung partai politik yang secara otomatis tidak memenuhi syarat pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan. Apabila sudah dikatakan memenuhi syarat dalam sipol, pengumpulan dukungan keanggotaan partai politik tidak sepenuhnya terlepas dari konflik kepentingan.

Berdasarkan data tanggapan masyarakat ditemukan sebanyak 71 kasus dari 18 partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tahun 2024.¹⁷ Hal ini didasari oleh keluhan dari masyarakat kepada KPU atas pencatutan namanya dalam keanggotaan partai politik. 71 Kasus tersebut terdiri atas masyarakat Kota Bukittinggi yang melaporkan kepada KPU bahwasanya identitas

¹⁶ Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, "Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia : Studi Pada Pemilihan Umum 2019", Jurnal Wacana Politik, Vol 4 No. 1, Padang, 2019, hal 25

¹⁷ KPU Kota Bukittinggi. Rekapitulasi Data Tanggapan Masyarakat Terkait Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Di Kota Bukittinggi. Lihat Lampiran Dokumentasi hal 134

mereka terdaftar dalam salah satu partai yang dilaporkan. Dengan mengikuti prosedur dari KPU, masyarakat diminta untuk melakukan pengisian formulir tanggapan masyarakat. Dari tanggapan masyarakat tersebut terdapat beberapa nama partai yang terlibat, diantaranya:

Tabel 1.1
Tanggapan Masyarakat Terkait Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik di Kota Bukittinggi

No	Nama Partai Politik	Jumlah Masyarakat yang Melapor
1	Partai Garda Perubahan Indonesia	2
2	Partai Ummat	10
3	Partai Golongan Karya	15
4	Partai Solidaritas Indonesia	4
5	Partai Bulan Bintang	7
6	Partai Persatuan Indonesia	5
7	Partai Keadilan dan Persatuan	3
8	Partai Kebangkitan Nusantara	3
9	Partai Demokrat	3
10	Partai Buruh	7
11	Partai Republik Indonesia	1
12	Partai PRIMA	1
13	Partai Gelora	5
14	Partai Nasdem	2
15	Partai Hati Nurani Rakyat	1
16	Partai Keadilan Sejahtera	1
17	Partai Gerindra	2
18	Partai Kebangkitan Bangsa	1

Sumber : KPU Kota Bukittinggi

Data diatas merupakan daftar dari partai politik yang dilibatkan karena terdapat identitas masyarakat sebagai pendukung dan keanggotaan partai politik yang bersangkutan. Apabila dilihat dari keterangan masyarakat yang terlibat menyatakan bahwa mereka tidak mendukung partai yang bersangkutan atau partai manapun. Bagi masyarakat yang merasa tidak mempunyai kepentingan atau merasa dirugikan dengan menjadi anggota partai politik, maka mereka dapat melakukan penghapusan nama dari partai politik yang bersangkutan. Dapat dilakukan dengan melakukan pengajuan penghapusan nama dengan mengisi formulir tanggapan masyarakat. Alasan mereka melakukan hal tersebut seperti sedang berada dalam proses mencari pekerjaan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dessy Rahmadani sebagai salah seorang masyarakat yang terdaftar dalam data tanggapan masyarakat, sebagai berikut :¹⁸

“...iya kemarin itu waktu ingin mendaftar kerja jadi PNS, saya terdaftar di salah satu partai. Setelah saya lakukan konfirmasi ke partai tersebut, namun hanya dikeluarkan di cabang partai disini saja, tidak dari pusatnya. Kemudian saya urus ke KPU dan ke kantor partainya, barulah saya dikeluarkan dari partai yang bersangkutan..”

Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik terutama dalam jumlah kepengurusan atau keanggotaannya. Menimbang perilaku masyarakat bahwa mereka akan cepat bergerak apabila disuguhkan dengan hal berbau materi terlebih dahulu. Secara rasional, perilaku yang tergolong kepada pragmatisme akan menciptakan strategi baru untuk pemenuhan keanggotaan partai politik.

¹⁸ Wawancara dengan Dessy Rahmadani sebagai masyarakat yang terdaftar dalam data tanggapan masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 11.49 WIB

Strategi disini merupakan respon atas karakter materialistik dari masyarakat. Sehingga berujung kepada ketidakjelasan dan idealnya suatu proses.

Masyarakat dianggap tidak mampu untuk memikirkan kemungkinan peluang baru bagi partai politik dalam pengumpulan dukungan keanggotaan. Dikarenakan ideal dari proses pengumpulan dukungan keanggotaan partai politik belum direalisasikan atas dominasi karakter masyarakat yang lebih mengutamakan keuntungan material. Dengan demikian broker mendapatkan probabilitas keterlibatan yang tinggi. Tidak sedikit dari partai politik yang mampu menjangkau setiap sudut masyarakat akar rumput. Partai politik mampu menempatkan broker sebagai jembatan penghubung untuk mencapai target kepengurusan atau keanggotaan. Mereka yang mengisi peluang akan mengambil peran penghubung tersebut sebagai broker.

Dari hubungan yang dibentuk, mereka akan memperoleh keuntungan baik itu secara moril maupun materil. Keuntungan moril dilandaskan atas kesetiaan diantara broker dengan partai politik. Tipologi *activist broker* lebih mengutamakan basis ideologi sebagai modal intriksik.¹⁹ Mereka memanfaatkan jejaring para tokoh masyarakat seperti ulama. Hal tersebut memiliki makna kebebasan tanpa melibatkan unsur materialistik. Terlepas dari hubungan atas dasar kesetiaan, broker juga dibangun dengan materi. Broker mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari hubungan tersebut. Terdapat dua tujuan dari keuntungan ini diantaranya untuk menjalin hubungan dalam kurun waktu yang panjang. Bukan berarti mengenyampingkan keuntungan materil. Akan tetapi

¹⁹ Wasisto Raharjo Jati, Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer : Perbandingan Pemilu 2024 dan Pemilu 2019, Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 5 No 2, Bawaslu, Indonesia, 2023, hal 81

materi dijadikan sebagai tolak ukur dan motivasi perihal memelihara hubungan tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu masyarakat yang masuk ke dalam daftar tanggapan masyarakat :

“...sebelumnya kami diajak sama tetangga untuk mendukung salah satu partai. saya mendapat informasi bahwa kami akan diberikan keuntungan jika mendukung mereka. Saya pikir ini tidak berpengaruh negatif dan saya juga akan mendapatkan keuntungan materi...”

Selanjutnya, broker mempunyai tujuan lain dengan memprioritaskan perolehan hasil terlebih dahulu. Kelompok broker ini memiliki fokus terhadap hubungan yang dijalin terutama dengan orang-orang dekat. Hal ini dinilai memberikan dampak baik untuk mendapatkan keuntungan dalam hal pengumpulan dukungan partai politik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hasni, salah satu masyarakat yang terdaftar dalam data tanggapan masyarakat :

“...kemarin itu ada Ibuk tetangga disini yang mengajak untuk mendukung salah satu partai. Dia bilang kita mendukung partai ini sekarang. Dikarenakan banyak orang yang ikut memberikan ktp, jadi saya ikut juga masuk ke dalam partai yang bersangkutan. Sebelumnya saya tidak mengetahui akan didaftarkan sebagai keanggotaan partai. Ketika saya ingin daftar pantarlih namun nama saya terdaftar dalam keanggotaan dua partai. Lalu saya cabut nama dari partai dan mendaftar sebagai pantarlih...”²⁰

Peneliti berasumsi bahwa terdapat jejaringan broker politik dengan tujuan menyalurkan dukungan keanggotaan kepada partai politik. Dari data hasil wawancara, adanya pembenaran terhadap data temuan awal yang diperoleh. Data tersebut menunjukkan sejumlah masyarakat yang terdaftar sebagai keanggotaan partai politik. Mereka memberikan kesaksian bahwa tidak pernah mendaftarkan diri sebagai keanggotaan partai yang bersangkutan atau partai manapun. Dengan

²⁰ Wawancara dengan Hasni Gusrita sebagai masyarakat yang terdaftar dalam data tanggapan masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 13.36 WIB

kata lain cara kerja broker dalam memperoleh dukungan keanggotaan tidak memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat. Perpanjangan tangan dari partai politik mengalihkan makna dukungan keanggotaan yang seharusnya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa broker cenderung mengandalkan massa yang dimiliki. Broker dapat mengumpulkannya melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau pertetanggaan. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya keleluasaan bagi broker untuk melobi masyarakat yang menjadi tujuannya. Broker politik mendapatkan kemudahan dalam perihal akses sehingga memegang dukungan untuk keanggotaan partai politik. Dengan demikian fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistematis Kerja Broker Politik Dalam Pengumpulan Dukungan Partai Politik Dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistematis kerja broker politik untuk pengumpulan dukungan partai politik dalam Pemilu Tahun 2024 Di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dari rumusan masalah penelitian yang sudah disebutkan diatas. Oleh karena itu, hasil penelitian yang sedang dilakukan diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Berikut penjelasannya :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana peran broker politik dalam pengumpulan

dukungan partai politik. Dengan begitu, bisa dijadikan sebagai sumber literatur bagi peneliti selanjutnya, yang juga akan melakukan penelitian tentang broker politik.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan mengenai jaringan broker dalam pengumpulan dukungan partai politik. Dengan begitu dapat mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan membantu masyarakat dan KPU Kota Bukittinggi menjelaskan realitas dari jaringan broker politik di lapangan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan dari hasil temuan peneliti di lapangan. Setelah beberapa bulan melakukan riset penelitian hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana keterlibatan broker dalam pengumpulan dukungan keanggotaan partai politik. Untuk mencapai target jumlah keanggotaan partai politik menggunakan perantara yang mana dapat menghubungkannya ke pada masyarakat. Dari Aspinal menjelaskan tiga tipologi broker yang dapat ditemukan dalam pemilu diantaranya *activist broker*, *clientalist broker*, dan *opportunist broker*. Dalam hasil temuan penelitian di lapangan ketiga tipologi tersebut ada prakteknya di Kota Bukittinggi. Broker sendiri sudah lama membangun jaringan sehingga menjadi mudah untuk mengumpulkan dukungan keanggotaan.

Banyak hal yang menarik dalam temuan peneliti di lapangan terkait keterlibatan broker tersebut. Maka dari itu membuat peneliti mengkaji tentang pembentukan jaringan masing-masing tipologi broker. Mereka terbentuk atas dasar motivasinya yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini partai politik memakai jasa broker, kemudian broker mencari orang untuk dijadikan perantaranya. Dengan kata lain broker juga bekerja sama dengan broker lainnya sehingga sampai kepada masyarakat. terlepas broker bekerja dengan membentuk jaringannya sendiri secara bertingkat untuk dapat menjangkau masyarakat lebih

banyak. Broker juga memanfaatkan jaringannya sendiri yang sudah lama terbentuk dalam mengumpulkan dukungan keanggotaan partai politik.

Pada intinya, mereka berperan sebagai perantara antara partai dengan masyarakat. Dalam satu broker bertindak atas kepentingan jaringannya masing-masing. Mereka bertindak untuk meyakinkan partai politik dan juga membangun jaringan dengan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Dengan begitu satu broker dapat dikategorikan ke dalam tipe dua tipologi sesuai dengan motivasi pembentukan jaringan broker itu sendiri.

Dalam praktiknya, Kota Bukittinggi didominasi oleh broker dikarenakan masih adanya sifat pragmatis dari masyarakat. Mereka tidak memerlukan jaringan yang terlalu kuat di belakangnya untuk membuat kesepakatan atau bertransaksi dengan partai politik. Akan tetapi dalam fokus jaringan broker aktivis broker lebih memberikan dinamika dasar pembentukan jaringan broker tersebut baik dengan partai politik maupun dengan masyarakat. Pada jaringan ini aktivis broker lebih banyak menjangkau masyarakat untuk mendapatkan dukungan keanggotaan partai politik.

Sedangkan jaringan dari *clientalist broker* bergerak dengan cara tersendiri. Hal ini dikarenakan atas dasar hubungan kekeluargaan pertetangga dan pertemanan sehingga jaringan yang terbentuk begitu saja. Berbeda dengan aktivis broker, mereka membangun jaringan dalam jangka waktu yang lama sehingga berdampak atas hubungan yang berlangsung. Mereka yang terlibat tidak memiliki alasan untuk memutuskan hubungan yang sudah terbentuk baik dari broker maupun dari masyarakat itu sendiri.

Selain itu, orang yang menjadi perpanjangan tangan partai politik kepada masyarakat memiliki jaringan yang fleksibel. Peran dari masing-masing tipologi broker dari Aspinall ditemukan dalam satu orang yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hubungan yang dibangun oleh broker itu merupakan dua pihak yang berbeda. Dengan demikian broker mampu mengempan peran ganda selama berperan sebagai perpanjangan tangan partai dalam mengumpulkan dukungan keanggotaan.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan dari hasil temuan peneliti di lapangan tentang jaringan broker dalam mengumpulkan dukungan keanggotaan partai politik pada pemilu tahun 2024 di Kota Bukittinggi, maka ada beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Secara akademis

Selama mengumpulkan dukungan keanggotaan partai politik melibatkan jaringan broker di Kota Bukittinggi. Temuan di lapangan peneliti sepakat apabila masyarakat diharuskan lebih kritis terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu. Dengan begitu akan membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan kritis. Selain itu temuan di lapangan memberikan pemaknaan baru bagi peneliti terhadap broker di Kota Bukittinggi. Bahwa broker juga dahulunya berperan sebagai masyarakat biasa, namun ada yang bermakna negatif atau positif. Dengan begitu penelitian ini memberikan pandangan baru terhadap penelitian selanjutnya bahwa pemaknaan broker tidak selalu negatif atau buruk. Kembali lagi kepada partai yang menggunakan jasa perantara atau broker tersebut.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut

- a. Terdapat saran dari peneliti untuk multi selanjutnya yang juga akan meneliti tentang broker politik dalam pemilu ataupun pilkada. Peneliti menyarankan untuk menjelaskan jaringan broker lebih fleksibel lagi. Seperti tipologi dari spinal bahwa adanya pengkategorian terhadap broker yang dibagi ke dalam tiga bagian. Sedangkan teman peneliti di lapangan membuktikan bahwa peran satu broker ternyata beririsan dengan peran broker lainnya. Dengan menggunakan teori dari peneliti mendapat keterbatasan dalam menganalisis data temuan di lapangan.
- b. Saran peneliti terhadap partai politik ialah peneliti berharap kepada partai politik untuk lebih menjelaskan kepada masyarakat secara detail terkait tujuan pengumpulan identitas KTP masyarakat yang nanti akan dimaksudkan ke dalam keanggotaan partai politik. Dengan keterbukaan tersebut peneliti menilai bahwa akan jauh lebih bermanfaat kepada semua pihak yang terlibat dan juga partai politik lebih dekat dengan masyarakat.
- c. Peneliti juga menyarankan kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan keuntungan sementara yang ditawarkan dalam masa pemilu oleh pihak manapun. Dengan begitu akan membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. "When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia." *Critical Asian Studies* (Routledge) 46, no. 4 (Oktober 2014): 545-570.
- Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGOv, 2014.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (Jiwa) 2020-2022*. n.d. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html> (accessed November 9, 2023).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (Km persegi) 2022*. n.d. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/153/65/1/luas-wilayah-per-kabupaten-kota.html> (accessed November 9, 2023).
- Febrianti, Dinda. *Pengertian, Manfaat dan Macam-Macam Jaringan Komputer (Bagian 1)*. Maret 16, 2017. <https://infopublik.sijunjung.go.id/pengertian-manfaat-dan-macam-macam-jaringan-komputer-bagian-1/> (accessed November 22, 2023).
- Guzman, Kurniawan Candra, and Nina Oktarina. "Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga." *Economic Education Analysis Journal* 7, no. 1 (2018): 301-315.
- Hamudy, Moh Ilham A, and Ahmad Imam M. Rais. "Broker Politik dan Mafia Anggaran dalam Parlemen di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 6, no. 3 (2014): 213-220.
- Haridison, Anyualatha. "Demokrasi digital dan dinamika broker dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 35, no. 4 (10 2022): 433-449.

- Harnom, Fauziah, Syahrizal, and Tengku Rika Valentina. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milenial Dalam Memahami Bahaya Vote Broker Oleh Kpu." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 1 (Mei 2019): 1-10.
- Hasahuddin, ddk. "Menilai Kualitas Pilkada dalam Era {andemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)." *Ilmu pemerintahan*, 2021.
- Hidayaturrahman, Mohammad, Sudarman, Naili Adilah Hamhij, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Ahmad Hasan Ubaid, and Elazhari. "Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 6, no. 2 (Desember 2022): 177-190.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 2023: 70-84.
- Koara, Dicky Rizki, Ubaidullah, and Ardiansyah. "Peran Reje Kampung Sebagai Broker Politik Pada Pemilu 2019 Di Aceh Tengah (Studi Kasus Reje Kampung Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 3 (Agustus 2021).
- Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra, Alfian Miko. "Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* , 2019.
- Layuk, Ovelio. "Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019." *Jurnal KPU*, 2019: 1-21.
- Mulyono, Agus. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bandung ." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 2021.
- Pratitaswari, Anindita, and Sri Budi Eko Wardani. "Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (Desember 2020): 217-228.
- Radiallah, Muhammad Khalig. "Broker Dalam Pilkada : Kajian Terhadap Kemenangan Fadly Amran Dan Asrul Dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018." 2019.

- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kaulitatif*. Edited by Hamzah Upu. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka PELajar, 2014.
- Sosiologi, Materi. *Pengertian Jaringan Sosial, Teori, Jenis, Fungsi, dan 6 Contohnya*. September 11, 2023. <https://dosensosiologi.com/jaringan-sosial/> (accessed November 22, 2023).
- Syafriandre, Aldho, Aidinil Zetra, and Feri Amsari. "Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (Maret 2019): 14-29.
- Utami, Diah Kurnia Sari. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serental Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2021.
- Zakky. *Pengertian Sosial (Definisi, Cakupan, Unsur-Unsur dan Contohnya)*. n.d. <https://www.seluncur.id/pengertian-sosial/> (accessed November 22, 2023).

